



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.02.2.01.0013.5.1.02.02.01.0026
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
Nama Rekening : Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Jumlah Anggaran (DPA) : 36,000,000.00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 36,000,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : APRIL

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				27,000,000.00
2	05 April 2024	00155	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS RENCANA PENETAPAN BARU DAN/ATAU TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	3,000,000.00	24,000,000.00
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	3,000,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	9,000,000.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	12,000,000.00	

Disetujui Oleh,
PENGGUNA ANGGARAN

NIRMAY NISWAN MUNGKASA, S.T., M.Ap
NIP : 19730325 200502 1 001

Makassar, 30 April 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

SLNUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. JEND AHMAD YANI NO.02 MAKASSAR

Makassar, 04 April 2024

Kepada Yth,

PT. Bank SULSELBAR Cabang Utama Makassar

Isi : 00000/SPB/BLIT/24/0024

Perihal : Pemindahbukuan

Lampiran : 2

Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk memindahbukuan uang kami untuk ditransfer dari :

Nomor Rekening Bank : 130.002.0000316367
 Atas Nama : BERDAWARA PENGELUARAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Pada Tanggal : 04 April 2024

Kepada pihak ketiga kami dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Rekening Bank : Rekening masing-masing penerima sesuai daftar terlampir
 Atas Nama : Nama penerima sesuai daftar terlampir
 NPWP :
 Urutan : BELAKA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS RENCANA PENETAPAN BARU DAN/ATAU TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024
 Program : PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Kegiatan : Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan

NO.	KODE REKOMENDASI	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.02.01.0026	Selanjutnya Jasa Tenaga Administrasi	3.000.000.00
Jumlah Pembekuan			3.000.000.00

POTONGAN

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO.BILLING	JUMLAH
1	130.000.3109012005	Joran Jaminan Kreditasi 2%	702404040750478	72.886.00
2	17035601000/ Bank BPD Sulselbar	Jaminan Hari Tua (JHT)		171.000.00
Jumlah Potongan				243.886.00

PAJAK

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO.BILLING	JUMLAH
Jumlah Pajak				0.00
Nilai yang ditransfer				2.756.114.00

Uang sejumlah : Dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah)

Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Makassar, 04 April 2024
 BERDAWARA PENGELUARAN

ETJARA AISYAH, S.AH
 NIP : 19600120 201410 2 001

0 00'000'000"E 0 00'000'000"E : [X] [Y] [Z]

0 00'490'821"E
 0 00'490'821"E
 0 00'000'000"E
 0 00'990'000"E

0 00'000'000"E

11111111 111111 111111111111 111 0011
 11111111 111111 111 11111111111 111 0011
 1111111111 11111111 11111111111 000 9911
 111 111111 111111111111 11111111111 000 9911
 111 111111111111 111111 11111111111 111 0011
 11111111 0011 111 111111111111 111111

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.02.2.01.0013.5.1.02.02.01.0026

Buku Kas No. : 00155

Tanggal : 05 APRIL 2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

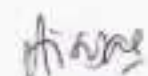
Banyaknya Uang : == TIGA JUTA RUPIAH ==

Untuk Pembayaran : BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS RENCANA PENETAPAN BARU DAN/ATAU TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTOR / DISETUJUI
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

BENDAHARA PENGELUARAN


ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

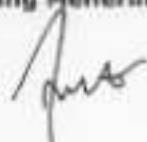
Jumlah Uang Rp. 3.000.000,-

MENGETAHUI

KABID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN DAERAH SELAKU PPTK


DODY AGRIYANTO, S.Sos., M.Si
NIP. 19741216 199311 1 001

Makassar, 05-04-2024
Yang Menerima,


SRI WIPARTI B MANGAWEAN

NO. DAFTAR: 00102/505000000020000/2024

DAFTAR: BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS RENCANA PENETAPAN BARU DAN/ATAU TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor / Tanggal SK : 346/setda/188.4/TAHUN 2024 / 11 Januari 2024

Kegiatan : 5.05.02.2.01 / Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0013 / Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi

Terhadap Pelaksanaan Peraturan

Rekening : 5.1.02.02.01.0026 / Belanja Jasa Tenaga Administrasi

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	BPJS Kesehatan 1%	Jaminan Hari Tua (JHT)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
1	SRI WINARTY B. MANGAWEANG 66.553.641.3-804.000 Rekening : 1302010000507573	Jasa Administrasi - Perjanjian/Perikatan Kerja (Kantor) / Tenaga Kontrak	1.500.000	x 1		1.500.000	36.433	85.500			1.378.067	1
2	SINTIA YULIANTI, S.T., M.Si 97.010.064.0-805.000 Rekening : 1302010000507581	Jasa Administrasi - Perjanjian/Perikatan Kerja (Kantor) / Tenaga Kontrak	1.500.000	x 1		1.500.000	36.433	85.500			1.378.067	2
	JUMLAH					3.000.000	72.866	171.000			2.756.134	

TERBILANG: TIGA JUTA RUPIAH

Makassar, 05-04-2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

KABID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAERAH SELAKU PPTK

DODY AGRIYANTO, S.Sos., M.Si
NIP. 19741216 199311 1 001

BENDAHARA PENGELUARAN

ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

PEMBUAT DAFTAR

FIRNAWATI, SE
NIP. 19770826 201212 2 001

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

BANK SULSELBAR

KEMENTERIAN KEUANGAN

DATA PEMBAYARAN :

Tanggal & Jam Bayar : 08-04-2024 12:52:00 NTB : 000002194255
Tanggal Buku : 16-04-2024 NTPN : 009807NAP9AOKTCE
Kode Cabang Bank : 146000 STAN : 194255

DATA SETORAN :

Kode Billing : 70240404050478
Nama Wajib Bayar : Badan Pendidikan dan Pengembangan Daerah Kota Nyo
Kode Referensi Lembaga : 999
Unit Kerja : 99
Saluran Kerja : 440780
Jumlah Setoran : 72.866
Terbilang : Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Replah

This is a computer generated message and required no signature
Informasi ini hasil cetakan computer dan tidak memerlukan tanda tangan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Date Pembayaran: Tanggal

Kode Billing

000002194255

Tanggal Billing

04-04-2024 12:52:00

Tanggal Buku

16-04-2024 12:52:00

Kode Cabang Bank

146000

STAN

194255

NTB

000002194255

NTPN

009807NAP9AOKTCE

STAN

194255

Kode Billing

70240404050478

Nama Wajib Bayar

Badan Pendidikan dan Pengembangan Daerah Kota Nyo

Kode Referensi Lembaga

999

Unit Kerja

99

Saluran Kerja

440780

Jumlah Setoran

72.866

Terbilang

Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Replah

Penyakit Billing
000002194255
Kode Billing: 000002194255
Nama: 000002194255
Unit Kerja: 000002194255
Saluran Kerja: 000002194255
Jumlah Setoran: 000002194255
Terbilang: 000002194255

Kode Billing

000002194255

Nama

000002194255

Unit Kerja

000002194255

Saluran Kerja

000002194255

Jumlah Setoran

000002194255

Terbilang

000002194255

Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Replah

NTB

000002194255

NTPN

009807NAP9AOKTCE

STAN

194255

Kode Billing

70240404050478

Nama

Badan Pendidikan dan Pengembangan Daerah Kota Nyo

Kode Referensi Lembaga

999

Unit Kerja

99

Saluran Kerja

440780

Jumlah Setoran

NTB
000002194255
NTPN
009807NAP9AOKTCE
STAN
194255
Kode Billing
70240404050478
Nama
Badan Pendidikan dan Pengembangan Daerah Kota Nyo
Kode Referensi Lembaga
999
Unit Kerja
99
Saluran Kerja
440780
Jumlah Setoran
72.866
Terbilang
Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Replah

NTB

000002194255

NTPN

009807NAP9AOKTCE

STAN

194255

Kode Billing

70240404050478

Nama

Badan Pendidikan dan Pengembangan Daerah Kota Nyo

Kode Referensi Lembaga

999

Unit Kerja

99

Saluran Kerja

440780

Jumlah Setoran

72.866

Terbilang

Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Replah

(Terdapat Papan Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Replah)

Tanggal Billing

04-04-2024

NTB

000002194255

NTPN

009807NAP9AOKTCE

STAN

194255

Kode Billing

70240404050478

Nama

Badan Pendidikan dan Pengembangan Daerah Kota Nyo

Kode Referensi Lembaga

999

Unit Kerja

99

Saluran Kerja

440780

Jumlah Setoran

72.866

Terbilang

Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Replah

History: 08/04/2024 12:52
08/04/2024 12:52

BUKTI PEMBAYARAN VIA VIRTUAL ACCOUNT



Teller : Nurul ahsyia
Cabang : Kantor Kas Balikpapan MKS
No Resi : 713796

Bulan lunas : 12/2023
Nomor : 17035501000 / 240400455582
Pembayaran :
Nama : NON PNS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Perusahaan : DAERAH KOTA MAKASSAR
Nomor NPP : 17035501
Kode Divisi : 000
Jumlah : Rp.171.000,00
Lunas

Status Pembayaran Anda Bisa Dilihat di email & Portal
E-Payment BPJS Ketenagakerjaan.
Struk ini Merupakan Bukti Pembayaran Yang Sah.
Terima Kasih.

BUKTI PEMBAYARAN VIA VIRTUAL ACCOUNT



Teller : Nurul ahsyia
Cabang : Kantor Kas Balikpapan MKS
No Resi : 713796

Bulan lunas : 12/2023
Nomor : 17035501000 / 240400455582
Pembayaran :
Nama : NON PNS BADAN PENELITIAN DAN
Perusahaan : PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Nomor NPP : 17035501
Kode Divisi : 000
Jumlah : Rp.171.000,00
Lunas

Status Pembayaran Anda Bisa Dilihat di email & Portal
E-Payment BPJS Ketenagakerjaan.
Struk ini Merupakan Bukti Pembayaran Yang Sah.
Terima Kasih.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassar.go.id, Pos-el sikdad@makassar.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR: 346/SETDA/188.4/TAHUN/2024 TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI
SERTA BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL
NEGARA PADA SUB KEGIATAN PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS
RENCANA PENETAPAN PERATURAN BARU DAN/ATAU EVALUASI
TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN PADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKERTARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kelancaran Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pada Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu adanya Tenaga Administrasi untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penunjukan dan Pemberian Belanja Jasa Tenaga Administrasi serta Belanja Iuran Jaminan/Asuransi bagi Non Aparatur Sipil Negara pada sub kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pada Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Indonesia Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Perangkat Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Daerah atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 tahun 2023);
8. Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);

9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayanan Publik yang berintegritas pada Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 32);
10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kota).

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor : 3475/188.4.45/Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Non ASN sebagai Laskar Pelangi Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SERTA BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SUB KEGIATAN PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS RENCANA PENETAPAN PERATURAN BARU DAN/ATAU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk 2 (dua) Orang Non ASN Tenaga Administrasi pada Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan pada Kantor pada Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Kepada 2 (dua) Orang Non ASN Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan Belanja Jasa Administrasi serta Belanja Iuran Jaminan/Asuransi pada sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan pada Kantor Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

- a. Belanja Jasa Tenaga Administrasi:
1.500,000,00 /Orang/Bulan
- b. Belanja Iuran/ Jaminan asuransi:
 1. Kesehatan : Rp141.000,00/Orang/Bulan
 2. Kecelakaan Kerja: Rp3.600,00/Orang/Bulan
 3. Kematian : Rp4.500,00/Orang/Bulan

- KETIGA : Pemberian Belanja Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diberikan sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas pada Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pada Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penunjukan dan Pemberian Belanja Jasa Tenaga Administrasi serta Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi Bagi Non Aparatur Sipil Negara pada sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Peraturan pada Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, akan diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


 Makassar
 11 Januari 2024
 P. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
 FIRMAN HAMID PAGARRA

Tembusan:

1. Wali Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 070.04/19/KEP/I/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI
SERTA BELANJA IUARAN JAMINAN / ASURANSI BAGI NON APARATUR
SIPIL NEGARA PADA SUB KEGIATAN PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS
RENCANA PENETAPAN PERATURAN BARU DAN/ATAU EVALUASI
TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, dipandang perlu memberikan belanja jasa tenaga administrasi serta belanja iuran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada sub kegiatan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
18. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor

tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Non ASN sebagai Laskar Pelangi Tahun Anggaran 2024;

19. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor 346/SETDA/188.4/TAHUN 2024 Tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan dan pemberian belanja jasa tenaga administrasi serta belanja iuran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada sub kegiatan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SERTA BELANJA IUARAN JAMINAN / ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SUB KEGIATAN PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS RENCANA PENETAPAN PERATURAN BARU DAN/ATAU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Memberikan belanja jasa tenaga administrasi serta belanja iuran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada sub kegiatan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan pada badan penelitian dan pengembangan daerah kota makassar tahun anggaran 2024 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar pada nama-nama sebagai berikut :

No	NAMA	NIK	JABATAN
1	SINTIA YULIANTI, ST, M. SI	7371125207840004	LASKAR PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN
2	SRI WINARTY B. MANGAWEANG, S. Kep	7371024612860003	LASKAR PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN

KEDUA : Pemberian belanja jasa tenaga administrasi serta belanja iuran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada sub kegiatan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2024 melalui DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Januari 2024
**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR,**



NIRWAN RISWAN MUNGKASA, ST, M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19730425 200502 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada :

1. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
2. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Pertinggal.